



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN
JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN 2025
SELASA, 5 NOVEMBER 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. PLT. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama, pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024, dengan agenda Penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Pada Rapat Paripurna dewan kemaren, Senin tanggal 4 November 2024, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda APBD Tahun 2025. Dari pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, terdapat beberapa tanggapan dan pertanyaan yang cukup penting dan strategis yang perlu dijelaskan dan ditanggapi oleh Gubernur terkait dengan

kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam Ranperda APBD Tahun 2205, diantaranya :

1. Ranperda APBD Tahun 2025 terlihat dalam kondisi yang pesimistis, dimana target pendapatan dan belanja yang diusulkan, jauh lebih rendah dari target tahun 2024 dan realisasi tahun 2023. Oleh sebab itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari pos PAD.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling kurang 40 % dan alokasi belanja pegawai maksimal 30 % dari total belanja daerah paling lama sampai tahun 2027. Sampai dengan rencana belanja tahun 2025, alokasi belanja insfrastruktur masih jauh dari yang diamanatkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah harus memiliki rencana anggaran yang untuk memenuhi alokasi anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

3. Sebagai APBD transisi, seperti apa kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mengakomodir penyalarsan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD Provinsi dengan program dan kegiatan yang dibiaya oleh APBN serta mengakomodir ruang untuk penyesuaian program prioritas Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Terkait dengan masukan, pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, tentu Pemerintah Daerah telah menyiapkan pula jawaban dan/atau tanggapannya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini. Untuk itu, kepada Sdr. PLT. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan
Gubernur terhadap PU Fraksi Ranperda APBD

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. PLT. Gubernur yang telah menyampaikan jawaban dan/atau

tanggapannya terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. PLT. Gubernur, secara prinsip telah dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan, tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi sebagaimana termuat dalam Pandangan Umum Fraksinya.

Namun demikian, apabila jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. PLT. Gubernur tersebut, masih ada yang perlu penjelasan lebih lanjut, maka menurut hemat kami kita dalam nanti dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun 2025 yang akan dilakukan oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah.

Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, maka pembahasannya telah dapat dilakukan oleh DPRD bersama

Pemerintah Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.

Sebelum DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan, kami menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian nanti dalam pembahasan :

1. DPRD dan Pemerintah Daerah harus mengali kembali semua potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena masih banyak kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program prioritas daerah.
2. APBD Tahun 2025 merupakan starting point pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 yang penyusunannya bersifat imperative. Hampir semua target indicator kinerja utama Pembangunan daerah ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, harus jelas pula dukungan Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk program maupun anggaran untuk pencapaian target RPJPD tersebut.

Rapat Paripurna, Undangan dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Jawaban atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat ini ditutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terhadap hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahilalamin” rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima Kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb***